

Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi

Nickel Modami; Muhammad Ulum Azza Zulfaqaar; Nicholas Samuel Tedja;
Maulana Danu Atmaja.; Universitas Pradita,
muhammad.ulum@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: The evolution of democracy in post-Reformasi Indonesia has been a major focus of Indonesian politics, especially during the presidency of each president. President BJ Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, and Joko Widodo. Each president has different leadership styles and contributions to strengthening democracy and addressing socio-political and human rights challenges in Indonesia. This journal uses a qualitative method with a library research approach to collect information from relevant literature sources. BJ Habibie started the reform era by opening up space for democracy and political freedom. Gus Dur emphasized the importance of the existence of justice, equality and diversity in democracy in government. Megawati faced the challenges of national economic, political, trust and security crises, but managed to maintain economic growth and stability. SBY brought Indonesia to a more mature democratic era, although hampered by many corruption scandals. Jokowi, who has a populist democratic leadership style, has a bad record in the form of identity politics, and the issue of efforts to systematically undermine the KPK institution. This research describes Indonesia's democratic journey and the efforts of its leaders in strengthening the country's democratic foundations.

KEYWORDS: Democracy, post-Reformation, Reformation, Politic

ABSTRAK: Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi menjadi sorotan utama dalam politik Indonesia, khususnya pada masa kepemimpinan setiap presiden. BJ Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Masing-masing presiden memiliki beragam gaya kepemimpinan serta kontribusi yang berbeda dalam memperkuat demokrasi serta menghadapi tantangan sosial-politik dan hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dari sumber literatur yang relevan. BJ Habibie memulai era reformasi dengan membuka ruang demokrasi dan kebebasan politik. Gus Dur menekankan pentingnya eksistensi keadilan, persamaan, dan keberagaman dalam demokrasi dalam pemerintahan. Megawati menghadapi tantangan krisis ekonomi, politik, kepercayaan, dan keamanan tingkat nasional, namun berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. SBY membawa Indonesia ke era demokrasi yang lebih matang, meskipun terkendala oleh banyak skandal korupsi. Jokowi yang mempunyai gaya kepemimpinan yang populistik, namun memiliki catatan buruk berupa politik identitas, dan isu upaya pelemahan sistematis lembaga KPK. Penelitian ini menggambarkan perjalanan demokrasi Indonesia dan upaya para pemimpinnya dalam memperkuat fondasi demokrasi di negara ini.

KATA KUNCI: Demokrasi, pasca-Reformasi, Pemerintah, Politik

I. PENDAHULUAN

Demokrasi muncul di Indonesia berangkat dari gagasan demokrasi yang dibuat oleh Soekarno berasal dari tradisi demokrasi yang ada di desa-desa Nusantara. Walaupun Indonesia menerapkan sistem demokrasi dari awal kemerdekaan, Dapat dilihat kedua presiden pertama di Indonesia, yaitu Presiden Ir. Soekarno yang menjabat selama 21 tahun (1945-1966) dan Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun (1966-1998). Kedua presiden tersebut memperlihatkan bagaimana mereka ingin memegang kekuasaan selama mungkin dengan sangat jelas. Setelah kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir, penulis mulai memasuki awal dari Era Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga saat ini. Era reformasi menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi modern yang bisa dilihat dari Pilkada 1999 dan Pilkada serentak 2020.

Pasca jatuhnya Orde Baru pada Mei 1998, Indonesia memasuki era baru dalam tata kelola politiknya yang dikenal sebagai Era Reformasi. Periode ini ditandai dengan transisi dari struktur otoriter menjadi sistem demokrasi yang lebih liberal dan terbuka. Reformasi ini tidak hanya melahirkan harapan baru bagi demokrasi, tetapi juga tantangan besar dalam implementasi dan praktik demokrasi di tingkat nasional dan lokal. Era pasca-Reformasi melihat serangkaian perubahan signifikan dalam konstitusi dan lembaga politik Indonesia. Amandemen konstitusi yang antara tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah struktur pemerintahan, termasuk pengurangan kekuasaan presiden dan peningkatan peran serta kewenangan legislatif dan yudikatif. Pemilihan langsung kepala daerah dan presiden yang diimplementasikan juga merupakan langkah signifikan menuju penguatan demokrasi.

Namun, transisi menuju demokrasi tidak berjalan mulus. Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti korupsi, nepotisme, serta lemahnya sebuah lembaga penegak hukum yang sering kali menghambat proses demokratisasi. Konflik horizontal di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa toleransi dan gerakan separatisme masih menjadi beban pekerjaan yang harus terus-menerus diatasi. Selain

itu, peran aktif masyarakat sipil dan peningkatan keterbukaan media telah menjadi katalis penting dalam memperkuat demokrasi. Aksi-aksi demonstrasi yang sering terjadi menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam politik semakin meningkat, meskipun terkadang diwarnai dengan ketegangan.

Jurnal ini akan menjelajahi bagaimana Indonesia demokrasi dan menyorot permasalahan mengenai, dengan segala kompleksitas sosial, politik, dan budayanya, berusaha menavigasi tantangan-tantangan tersebut dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang adanya dinamika dan evolusi demokrasi di Indonesia pasca reformasi, dengan harapan dapat memberikan wawasan untuk peningkatan tata kelola demokrasi dan pembenahan demokrasi di masa yang akan datang.

Sebelum terjadinya era reformasi di Indonesia, masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun di Indonesia. Pemerintahan Orde baru memiliki tujuan utama yaitu mempertahankan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Pada tahun 1966 hingga 1980, periode ini dikenal sebagai konsolidasi Orde Baru dan kepemimpinan Soeharto. Salah satu peristiwa yang terjadi pada masa ini adalah upaya menggantikan Soekarno dengan Jenderal Soeharto. Upaya ini memiliki peran yang signifikan terhadap perubahan politik setelah peristiwa 1965 walaupun perubahan tersebut pada awalnya tidak terlalu radikal. Langkah pertama yang diambil Soeharto pada saat itu adalah melalui Sidang Umum MPR tahun 1967. Sidang ini pada akhirnya mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden oleh MPRS menggantikan Soekarno.

Pada masa kepemimpinan Orde Baru di bawah Soeharto, media massa digunakan secara efektif sebagai alat propaganda. Pemerintah mengendalikan media cetak dan elektronik, termasuk TVRI yang merupakan stasiun televisi nasional tunggal, untuk menyebarkan informasi yang mendukung agenda pemerintah. Konten yang ditayangkan, baik di surat kabar maupun di televisi, umumnya bertujuan membangun citra positif Orde Baru dan menyebarluaskan slogan-slogan

pemerintah. Dalam situasi ini, media tidak lebih dari sarana pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesannya, dengan masyarakat hanya berperan sebagai penerima dari propaganda tersebut. (Hadi & Kasuma, 2012).

Demokrasi di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 setelah runtuhnya Orde Baru. Transformasi ini ditandai oleh serangkaian perubahan konstitusional yang mengarah pada penguatan lembaga demokrasi dan peningkatan partisipasi publik dalam proses politik. Menurut Aspinall (2005), era Reformasi membuka jalan bagi liberalisasi politik di mana sistem multi-partai diperkenalkan dan pemilihan umum menjadi lebih transparan dan kompetitif. Ini merupakan langkah besar dari sistem otoriter yang lebih sentralistik di bawah kepemimpinan Soeharto, di mana kebebasan sipil dan politik sering kali dibatasi. Lebih lanjut, demokrasi di Indonesia juga diuji dengan berbagai tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan politik identitas, yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Tantangan-tantangan ini sering kali menghambat efektivitas kebijakan publik dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan (Mietzner, 2015). Selain itu, meskipun ada peningkatan dalam partisipasi politik, masih ada masalah keterwakilan dan kualitas demokrasi yang harus terus diperbaiki.

Pada akhirnya, meskipun Indonesia sudah mempunyai kemajuan yang signifikan dalam menjalankan mekanisme demokratis, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam rangka mengkonsolidasikan demokrasi yang berkelanjutan. Ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan transparansi, serta mendorong budaya politik yang lebih demokratis

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sehingga penelitian ini melakukan pengumpulan fakta secara eksploratif dan identifikasi data. Unsur-unsur dalam metode penelitian ini adalah mengangkat pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data secara spesifik, dan

menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum (Kusumatuti, 2019). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada dan berhubungan penelitian (Adlini, 2022). Secara lebih khusus analisis dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis mengemukakan karakter literatur berupa pengarang dan jurnal.

Adapun metode studi pustaka (library research) yang dikemukakan oleh Arikunto (2006). Nina (2020) mendefinisikan metode studi kepustakaan (library research) sebagai sebuah metode dengan cara mengumpulkan data dan juga memahami serta mempelajari teori-teori yang berkaitan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Arikunto (2006) menambahkan bahwa studi pustaka (library research) dapat dilakukan dengan membaca dan mencatat berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Era BJ Habibie

Era reformasi dimulai dengan kepemimpinan presiden ke-3 Indonesia yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. BJ Habibie merupakan seorang ilmuwan fisikawan pesawat terbang, ia menjadi salah satu lulusan terbaik di Jerman pada saat itu. Apabila diteliti lebih lanjut, gaya kepemimpinan BJ Habibie mengacu pada kebiasaan sehari-hari dan latar belakang nya. BJ Habibie cenderung melakukan pertimbangan dengan sendiri dan rangsangan intelektual. Gaya kepemimpinan ini juga disebut sebagai gaya kepemimpinan transformasional. Era kepemimpinan BJ Habibie memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap demokrasi seperti pemberian kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan pers, dan pelepasan narapidana politik. BJ Habibie juga memberikan

kebebasan pada masyarakat Timor Timur memilih untuk merdeka atau tetap dalam naungan Republik Indonesia. (Rani & Ridwan, 2015). Kebijakan-kebijakan tersebut menekankan dan memulihkan nilai demokrasi di Indonesia yang memberikan kebebasan dalam berpolitik dan juga berpendapat apabila dibandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung otoriter.

B. Era K.H. Abdurrahman Wahid

Indonesia masih merasakan pahit-manisnya berdemokrasi. Dalam wacana demokrasi, Abdurrahman Wahid menjadi tokoh penting Indonesia. Bagi dia, tak terlalu penting mendefinisikan demokrasi, melainkan bagaimana mewujudkannya. Kedaulatan hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, pluralitas, dan pemberdayaan masyarakat sipil penting di dalam pemerintahan demokratis. Agama (Islam) tidak harus menjadi tujuan politik, tapi harus mengedepankan keadilan, persamaan, dan demokrasi. Hal ini disebabkan untuk menemukan format perjuangan semua elemen negara dan masyarakat bangsa bersama-sama guna mencapai cita-cita bersama sebagaimana tertulis dalam UUD 1945. Merujuk kepada Abdurrahman Wahid bukan berarti mengikuti sepenuhnya pikiran dan tindakannya, tapi hanya mendukung referensi pemikiran yang diwakili olehnya yaitu: kebangsaan, sekularisasi, demokrasi, dan transformasi sosial. Keberpihakan pada Abdurrahman Wahid adalah pada level pemikiran, bukan pada level aksi dan kebijakan sebagai aplikasi dari sistem tersebut. Akademisi Fathoni mendukung gagasannya tentang negara kebangsaan, bukan negara Islam atau model negara 'Piagam Jakarta' yang sering dikutip dari ajaran Soekarno dan Renan tentang makna berbangsa. (Fathoni, 2017)

Penulis mendukung pembubaran Departemen Penerangan, Departemen Sosial, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi menentang beberapa kebijakannya yang bertentangan dengan sistem pemikiran yang diwakilinya. Contohnya, mempertahankan Departemen Agama dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan adalah masalah masyarakat, bukan negara. Dulu NU kritis terhadap

Departemen Agama yang dianggap diskriminatif terhadap agama non-Islam dan menindas agama lokal. (Muhaimin Iskandar, 2010)

Gus Dur menjadi tokoh pengusung Demokrasi pasca-Reformasi sehingga terpilihnya sebagai Presiden membuktikan bahwa ia tokoh yang terpercaya dan dianggap mampu menjadi pemimpin Indonesia. Kondisi inilah yang dialami Indonesia Pasca Orde Baru, merupakan suatu kewajaran karena Indonesia baru mengalami masa transisi dari Orde ke Reformasi Demokrasi tak bisa meletakkan kebebasan tanpa hukum maka Demokrasi yang dewasa adalah pelaksanaannya berdasarkan hukum, sehingga pentingnya memahami dan melaksanakan hukum yang berlaku.

Kesadaran akan hukum membuat Gus Dur membahas mengenai Islam dan konstitusi Negara, pembahasan ini penting Karena Konstitusi merupakan Hukum Tata Negara yang melandasi Negara. Akan tetapi apabila Negara sebaliknya melanggar Hak Asasi Manusia maka setiap orang yang beragama harus melakukan kebaikan dan menghalangi keburukan sebagai realisasi dari kesalehan sosial dan upaya ini dibantu dengan perjuangan demokrasi. (Purnawati, 2020)

Filosofi politik Gus Dur bersifat anti-totaliter dan berfokus pada media sebagai pusat politik tempat masyarakat menentukan prioritasnya. Posisi ini tidak membuat suatu bangsa menjadi negara yang berdaulat, melainkan menjadi masyarakat yang otoriter dan tidak korup. Filosofi Gus Dur berakar pada subkultur pesantren, dan komunitas pesantren lebih mandiri dari rezim militer. Subkultur ini juga ditandai dengan tidak adanya oligarki negara totaliter.

Dari segi filosofis, filsafat Gus Dur berpijak pada konsep UUD, dan ingin menjadikan UUD sebagai hukum tertinggi. Hal ini berangkat dari ideologi rasial Sunni yang menitikberatkan pada negara sebagai penentu supremasi hukum. Filosofi politik Gus Dur bercirikan keyakinan yang kuat terhadap peran elit dalam pembangunan nasional, namun pada saat yang sama juga adanya penolakan yang kuat terhadap institusi demokrasi. (Abdul & Hotrun, 2021).

C. Era Megawati Sukarnoputri

Pada era kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri, permasalahan utama pada masa pemerintahan Megawati bersifat multidimensional seperti masalah krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan dan krisis keamanan nasional yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Dalam menghadapi krisis multidimensional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Megawati Sukarnoputri melakukan perundingan, diplomasi, dan kebijakan ekonomi yang berkualitas. Selain itu, krisis dalam dan luar negeri teratasi dengan amanat UUD 1945. Krisis sosial diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Konflik lingkungan diselesaikan dengan dibentuknya Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Terakhir, krisis keamanan yang diselesaikan dengan UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Kebijakan penyejahteraan TNI/Polri. Dari keberhasilan-keberhasilan tersebut, Megawati Soekarnoputri sebagai aktor sentral dalam memimpin Indonesia berhasil menciptakan ekonomi yang tersentralisasi dan sistem politik yang lebih demokratis. (Soekarnoputri, 2021).

Megawati berhasil menjadi penerima suara yang signifikan karena popularitas yang ia warisi dari ayahnya, Soekarno, Presiden Pertama Indonesia. Ia dianggap sebagai pemimpin yang karismatik dan disenangi oleh anggota partai dan pendukungnya. Megawati menunjukkan ketegasannya sebagai ketua partai dengan menolak intervensi pemerintah, dan sikapnya yang berani dalam berposisi membuatnya dianggap sejajar dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Sebagai salah satu penggerak perubahan menjelang akhir Orde Baru, Megawati memiliki sifat-sifat yang menandai kepemimpinan karismatik, termasuk keyakinan diri, visi misi yang jelas, dan semangat untuk mengawal perubahan. (Agustin, 2012).

D. Era Susilo Bambang Yudhoyono

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada 20 September 2004 menandai pemilihan presiden secara langsung pertama kali dalam sejarah Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan 60,62% suara yang meyakinkan dalam pemilihan

putaran kedua melawan presiden petahana Megawati Sukarnoputri. Kemenangannya menjadi harapan rakyat Indonesia yang telah melekat pada dua janji dari presiden baru ini, yaitu demokrasi dan pemberantasan korupsi (Malley, 2005).

Terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi keresahan dari sebagian masyarakat Indonesia. Keresahan ini muncul karena SBY merupakan tokoh dengan latar belakang militer, Jenderal TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Latar belakang militer SBY menimbulkan kekhawatiran akan menggerogoti prinsip-prinsip sipil dalam pemerintahan, serta potensi kembalinya konsep dwifungsi ABRI dan pengaruh militer yang kuat di ranah politik Indonesia (Warburton, 2016).

Dalam jurnal "Indonesian Studies Working Papers" oleh Sydney Southeast Asia Centre, Eva Sundari (2015) menganalisis persepsi publik mengenai SBY dan pemerintahannya. Sundari menyoroti adanya keraguan yang signifikan dari masyarakat sipil mengenai kemampuan SBY untuk membangun pemerintahan yang benar-benar demokratis dan mengakhiri adanya dominasi militer dalam politik Indonesia. Kekhawatiran ini dipicu oleh pengalaman buruk di masa lalu di bawah rezim Orde Baru, di mana militer memiliki kontrol yang besar atas proses politik dan pemerintahan.

Terlepas dari komitmen SBY untuk menegakkan demokrasi dan meninggalkan praktik-praktik Orde Baru, keresahan publik masih tetap berkembang. Beberapa pihak menganggap bahwa latar belakang militer SBY dapat membawanya kembali ke pola kepemimpinan otoriter dan meminggirkan adanya peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan (Sundari, 2015).

Masa jabatan pertama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden ditandai dengan peningkatan yang signifikan dalam kebebasan politik dan stabilitas. Namun, kemajuan dalam menangani korupsi dan melaksanakan reformasi yang sangat dibutuhkan masih belum signifikan. Meskipun pemerintahan Yudhoyono berhasil mempertahankan

pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kepercayaan investor, masih ada kekhawatiran akan kurangnya langkah-langkah konkret untuk mengatasi korupsi yang endemik di dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Selama masa jabatannya yang kedua dari 2009 sampai 2014, Susilo Bambang Yudhoyono membuat beberapa kemajuan dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun, rekam jejak pemerintahannya terganggu oleh skandal korupsi besar yang melibatkan para pejabat tinggi dan Partai Demokrat sendiri. Selain itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dikritik karena kegagalannya dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, intoleransi agama, dan degradasi lingkungan (Mietzner, 2015).

E. Era Joko Widodo

Pada Era kepemimpinan Jokowi merupakan lanjutan demokratis yang ada di Indonesia, presiden Jokowi pertama kali terpilih pada tahun 2014 dan terpilih kembali pada tahun 2019. Pada kepemimpinan presiden Jokowi dinilai sebagai kepemimpinan moderat, berfokus pada infrastruktur, reformasi birokrasi, dan inklusivitas ekonomi. Tetapi juga menghadapi kritik serta isu kebebasan sipil untuk menegakkan hukum.

Presiden Jokowi membawa gaya kepemimpinan yang cenderung populis demokratik. Kepemimpinannya menunjukkan adanya pendekatan yang dilakukan presiden Jokowi mengarah kepada inklusif dan partisipatif dalam demokrasi, namun tetap dengan beberapa tantangan yang dijumpai (Smith, 2019).

Pada awal masa jabatan presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan ekonomi dapat memperkuat demokrasi. Namun dibalik infrastruktur yang didorong oleh presiden Jokowi menimbulkan kritik tentang fokus berat terhadap pembangunan akan berdampak dengan mengabaikan aspek lainnya seperti bebas berpendapat dan HAM (Jones, 2018).

Era presiden Jokowi memiliki ciri - ciri yakni politik identitas, namun Jokowi telah membentuk dinamika politik di Indonesia. Selain itu Jokowi mempererat polarisasi berdasarkan status sosial, agama dan etnis, beliau tidak lepas dari politik identitas karena wakil presiden yakni

KH. Ma'ruf Amin beliau adalah mantan ketua MUI sebelum menjadi wakil presiden. (Doe & Rahman, 2020) Di masa kepemimpinan Jokowi banyak mendapatkan laporan tentang isu kebebasan sipil atau kebebasan pers mengalami penurunan, dikarenakan tekanan dari berbagai lembaga seperti contoh Freedom House yang telah menurunkan skor Indonesia di beberapa aspek kebebasan. (Freedom House, 2021)

Era kepemimpinan Joko Widodo menjadi masa yang berpengaruh dalam sejarah KPK, di mana lembaga ini mengalami berbagai bentuk tantangan yang mengancam independensi dan efektivitasnya. Meskipun pemerintah menegaskan berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi, dinamika politik dan kebijakan yang diambil selama periode ini menunjukkan adanya upaya sistematis yang berpotensi besar untuk melemahkan lembaga KPK.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi yang disahkan pada september 2019, menimbulkan kontroversi karena mengandung poin di dalamnya yang mengurangi independensi dan kewenangan lembaga KPK dalam melakukan penyidikan serta penuntutan. (Setiawan & Suharto, 2020).

Secara menyeluruh pada masa pemerintahan Jokowi beliau dihadapkan dengan tantangan yang kompleks, termasuk kemajuan dalam beberapa sektor namun penurunan dalam beberapa aspek. Mengatur keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan hak asasi manusia serta kebebasan sipil masih menjadi isu sentral dalam diskusi demokrasi Indonesia. (Lee, 2019).

IV. KESIMPULAN

Pasca jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan menuju demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Setiap presiden telah memberikan kontribusi unik terhadap proses demokratisasi, mulai dari liberalisasi politik hingga peningkatan hak-hak sipil, yang menandai era baru dalam tata kelola negara.

Presiden B.J. Habibie, sebagai pelopor era reformasi, mengambil langkah berani dengan mengimplementasikan kebebasan pers dan kebebasan untuk membentuk partai politik, serta memberikan kesempatan kepada Timor Timur untuk memilih nasibnya sendiri. Hal ini menunjukkan komitmen awal Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

K.H. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, melanjutkan upaya tersebut dengan menekankan pada prinsip-prinsip pluralitas, keadilan sosial, dan desentralisasi, mengurangi peran negara dalam kehidupan beragama, dan mempromosikan dialog antar kelompok dan agama. Gus Dur menggambarkan demokrasi bukan hanya sebagai sebuah sistem politik tetapi sebagai proses terpenuhinya hak dan kebebasan individu.

Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, masing-masing dengan latar belakang dan pendekatan yang berbeda, terus mengembangkan infrastruktur demokrasi. Megawati berusaha mengatasi krisis multidimensi dengan mempertahankan stabilitas nasional, sementara Yudhoyono berfokus pada reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik dalam pemerintahan.

Terakhir, kepemimpinan Joko Widodo menandai periode stabilisasi dan konsolidasi lebih lanjut dari praktik-praktik demokratis, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola yang lebih bersih dan efisien, meskipun masih dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti intoleransi, politik identitas dan pelemahan KPK.

Dari era Habibie hingga era Jokowi, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi bila dibandingkan dengan era pra-Reformasi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan yang persisten dan kompleks. Perjalanan demokrasi Indonesia adalah bukti dari ketahanan dan kemauan rakyatnya dalam membangun sebuah negara yang lebih adil dan berdaulat, sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari perubahan kebijakan dan undang-undang, tetapi juga dari partisipasi aktif berdemokrasi dan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul, M. F., & Hotrun S, MSi., (2021). Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi Indonesia, 375-377.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980
- Agustin. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press
<https://www.jstor.org/stable/40376421>
- Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99–114.
- Crouch, H. (2010). *Political reform in Indonesia after Soeharto*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Fathoni, K. (2017). *DEMOKRASI POLITIK (Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Menurut Gus Dur)*
- Freedom House. (2021). *Country Report: Indonesia*. Retrieved from <https://www.freedomhouse.org/country/indonesia>
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 1(1), 1-109.
- Iskandar, A. M. (2010). *Melanjutkan Pemikiran & Perjuangan Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Jones, L. (2018). Democracy and Development in Southeast Asia: The Case of Indonesia. *International Affairs*, 94(5), 1123-1141.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

- Lee, S. (2019). Economic Development and Democratic Depth in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 36(2), 278-295.
- Malley, M. S. (2005). Renovating the Psychologist in Indonesian Politics. *Indonesia*, 79.
- Mietzner, Marcus. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. *Policy Studies*, 72.
- Nina, M.A, dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Kepustakaan. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*. Vol. 6, No. 1. pp. 974-980.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- Rani, A. M., & Ridwan, M. (2015). Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru Tahun 1998-1999. *Jom FISIP*, 2(2), 1-9.
- Setiawan, I., & Suharto, B. (2020). Dampak revisi UU KPK terhadap independensi lembaga. *Jurnal Hukum dan Politik*, 34(1), 22-45.
- Smith, R. (2019). Populism and Democratic Decay in Indonesia: The Era of Jokowi. *Political Science*
- Soekarnoputri, M. (2021). Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(1), 49-66.
- Sundari, E. (2015). President Yudhoyono and the Insiders: Pursuing Controlled Democracy. *Indonesian Studies Working Papers*, 15, 1-22. Sydney Southeast Asia Centre, University of Sydney.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Face of Indonesian Democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 305-326.